

BAB I

PENDAHULUAN

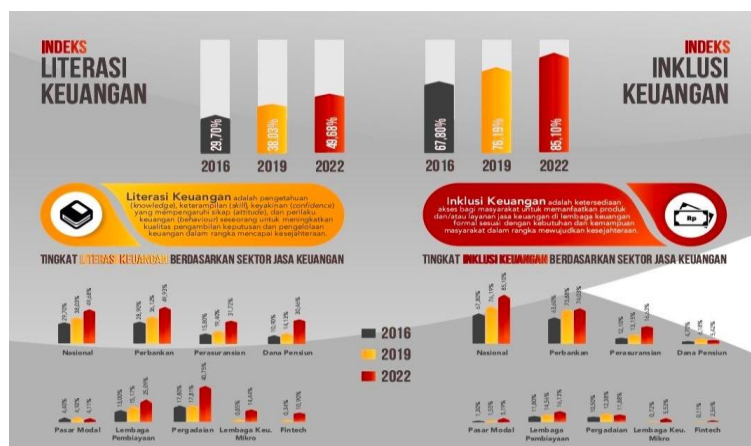
1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi UMKM pada tahun 2025 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,9% menunjukkan pentingnya peran UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM mempekerjakan sekitar 119 juta orang, mencakup 97% dari total angkatan kerja di Indonesia (Pane *et al.*, 2025). Hal ini menegaskan bahwa UMKM merupakan penyumbang utama lapangan kerja di negara Indonesia. Selain itu, UMKM juga berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Beberapa peran penting UMKM antara lain: penciptaan lapangan usaha baru, peningkatan pemerataan ekonomi, dan pelestarian budaya serta kearifan lokal (Septiani *et al.*, 2024).

Meskipun UMKM saat ini menjadi salah satu ujung tombak dalam menyediakan layanan prasarana dan produk, tetapi faktanya UMKM memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, dalam manajemen keuangan UMKM sering menghadapi kendala dalam pencatatan transaksi maupun pengelolaan proforma keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan akses ke modal (Sayono *et al.*, 2022). Kedua, UMKM kesulitan akses terhadap pembiayaan akibat laporan keuangan yang kurang dapat dipercaya (Rusmanah & Andrianto, 2021). Ketiga, meskipun berpandangan bahwa pelaporan keuangan yang mengacu pada standar dapat bermanfaat dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, serta mempermudah pelaporan keuangan (Rusmanah *et al.*, 2025), UMKM seringkali tidak mempertimbangkan dengan matang perencanaannya, sehingga saat terjadi kondisi di luar prediksi mereka sulit mempertahankan usahanya (Rohmansyah *et al.*, 2023). Kendala yang dihadapi UMKM selanjutnya yaitu masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya pencatatan keuangan. Padahal pencatatan yang lebih baik menjadi dasar yang kuat untuk menyusun proyeksi keuangan, sehingga perencanaan usaha dapat dilakukan lebih terarah dan mendukung keberlanjutan bisnis (Rahmi *et al.*, 2023). Terakhir UMKM memiliki sumber daya yang terbatas, termasuk sumber daya dalam mengelola keuangan dan manajemen produksi (Andria *et al.*, 2022).

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi UMKM. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa literasi keuangan UMKM meningkat sebesar 30% setelah pendampingan dan berdampak pada peningkatan *omzet* lewat penetapan harga yang lebih tepat (Sari *et al.*, 2023). Upaya yang lain adalah meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM, termasuk di dalamnya meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal seperti pinjaman, tabungan, asuransi, pengelolaan risiko, serta menjaga stabilitas operasional. Tingkat inklusi

keuangan yang baik memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM karena memungkinkan mengatasi keterbatasan modal dan memperluas kapasitas usaha (Putu *et al.*, 2025).



Sumber: Data sekunder, survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2022.

Gambar 1. 1 Data Indeks Literasi dan Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016-2022

Berdasarkan data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan nasional mengalami peningkatan signifikan selama enam tahun terakhir. Indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 67,80% pada tahun 2016, meningkat menjadi 76,19% pada tahun 2019, dan mencapai 85,10% pada tahun 2022, artinya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sudah cukup luas, tetapi belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat literasi yang memadai. Literasi keuangan dan inklusi keuangan berperan penting dalam membantu pengusaha kecil untuk membuat proyeksi keuangan yang tepat sehingga dapat berhasil menjalani dua transformasi besar, yaitu digitalisasi keuangan dan keberlanjutan (*Twin Transition*) (Pradnyani *et al.*, 2025; Ignazio *et al.*, 2025). Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan berdampak langsung maupun tidak langsung pada optimalisasi kinerja UMKM melalui pengambilan risiko yang lebih sehat dan strategis (Sulistiono *et al.*, 2025), serta pentingnya proyeksi keuangan bagi UMKM.

Proyeksi keuangan menjadi acuan dalam menilai kelayakan dan potensi keberhasilan suatu aktivitas bisnis. Studi kelayakan bisnis pada penelitian mencakup tentang bisa atau tidaknya suatu proyek investasi dilaksanakan dengan risiko yang paling kecil (Imron *et al.*, 2024). Adanya perencanaan keuangan menjadikan sebuah bisnis yang akan dimulai memiliki proyeksi dana keluar dan masuk untuk operasional dalam jangka waktu tertentu, sehingga meminimalisir terhentinya usaha karena kekurangan dana dan tidak memiliki dana cadangan (Rohmansyah *et al.*, 2023). Menurut Roswina *et al.* (2025) perencanaan keuangan menjadi pondasi agar dapat mengelola pendapatan, pengeluaran, serta investasi secara efektif.

Penelitian pada UMKM *fashion* batik AV *Collection* menunjukkan bahwa analisis *financial* terhadap seberapa layak proses produksi agar memberi laba usaha dengan menghitung *NPV* (*net present value*), memperoleh keuntungan sangat besar (Febriyanti, 2023). Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa analisis kelayakan investasi dapat dihitung dengan menggunakan nilai *NPV*, nilai *IRR* (*Internal Rate of Return*), analisis rasio *B/C* (*Benefit Cost Ratio*), dan perhitungan periode pengembalian modal, sehingga bermanfaat untuk melihat kelayakan dan keberlangsungan usaha dalam menghadapi risiko ketidakpastian atau yang dikenal dengan studi kelayakan (Irwandi, 2024). Selanjutnya, selain instrumen di atas, analisis kelayakan dapat menggunakan *BEP* (*Break Even Point*) (Zulfa *et al.*, 2024). Oleh karena itu, kegiatan ini dijadikan untuk mengangkat masalah proyeksi keuangan dalam menilai kelayakan bisnis di UMKM Batik Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Hal ini relevan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Kemang yang masih minim dalam kemampuan menyusun proyeksi keuangan yang komprehensif dan akurat, serta memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah sehingga dapat meningkatkan risiko salah perhitungan biaya, harga, dan laba yang pada akhirnya menghambat keberlanjutan usaha (*Going Concern*).

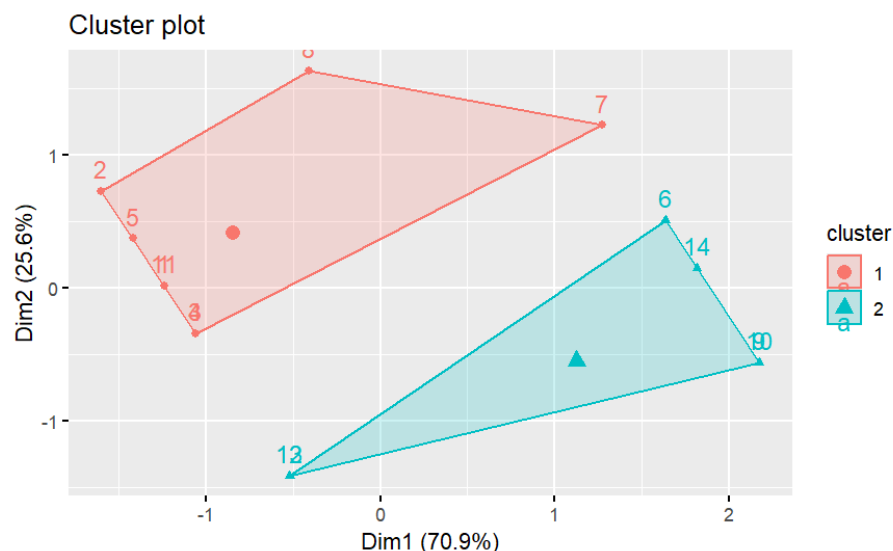
Kecamatan Kemang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bogor dengan luas 26,68 km² yang terbagi dalam sembilan desa/kelurahan. Desa terluas adalah Desa Tegal, sedangkan desa dengan kepadatan tertinggi adalah Semplak Barat dan yang terendah Atang Senjaya. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kota Bogor di selatan dan berada pada jalur strategis menuju pusat-pusat ekonomi Jabodetabek (Daryanto *et al.*, 2024). Masyarakat Kecamatan Kemang memiliki keunggulan dengan ciri khas motif batik tulis dan batik cetak khas Kemang. Kondisi ini menjadi modal yang mendukung pengembangan usaha kerajinan lokal, tetapi terdapat kelemahan berupa keterbatasan akses modal usaha, dan minimnya terhadap literasi keuangan. Hal ini turut berpengaruh pada usaha batik yang sering kesulitan memperoleh modal dari *external* sehingga menjadi tantangan persaingan yang ketat dengan produk industri pabrikan (Daryanto *et al.*, 2024). Batik Kemang, dengan kekhasan motif yang dapat mengangkat identitas lokal, berpotensi menjadi salah satu produk unggulan daerah. Kepadatan penduduk yang tinggi serta akses transportasi yang baik ke Kota Bogor dan Jabodetabek, wilayah ini berpeluang besar menjadi pusat pertumbuhan UMKM.



Sumber: Dokumentasi Pemilik Batik, 2025

Gambar 1. 2 Batik Kemang dan Batik Lawang Kori

Berdasarkan hasil survei awal terhadap para pelaku UMKM dari Desa Kemang, Desa Tegal, Desa Parakan Jaya, Desa Atang Sanjaya, Desa Jampang, Desa Semplak Barat, Desa Pondok Udik, dan Desa Bojong terkait permasalahan *financial* di Kecamatan Kemang dapat dipetakan mengenai akses pelaku UMKM ke lembaga keuangan dan permodalan, serta pencatatan keuangan. Melalui 14 responden diperoleh *Clustering* kondisi saat ini para pelaku UMKM di Kecamatan Kemang.



Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Gambar 1. 3 Data hasil *Clustering* Menggunakan R Studio

Berdasarkan hasil analisis *Clustering* terhadap 14 responden dari delapan desa, diperoleh dua kelompok utama. *Cluster 1* terdiri dari responden 2, 3, 5, 7, 8, dan 11 yang menunjukkan kondisi relatif kurang baik dalam akses terhadap lembaga keuangan maupun dalam aspek permodalan dan pencatatan keuangan. *Cluster 1* berada pada kondisi yang kurang optimal, sedangkan *Cluster 2* yang terdiri dari responden 6, 10, 13, dan 14 berada pada posisi lebih unggul, terutama dalam hal akses ke lembaga keuangan, pengelolaan permodalan, serta pencatatan keuangan. Perbedaan ini menegaskan bahwa tingkat literasi dan praktik keuangan para pelaku UMKM di Kecamatan Kemang masih bervariasi, sehingga belum terdapat keseragaman dalam pengelolaan aspek *finansial* dasar. Berikut *Summary table* hasil *Clustering* berdasarkan nilai *Mean* atau rata-rata.

Tabel 1. 1 *Summary* Hasil *Clustering* Berdasarkan Nilai *Mean*

Cluster	Akses Kelembaga Keuangan dan Bank	Permodalan dan Pencatatan Keuangan
<int>	<dbl>	<dbl>
1	3.125000	2.250000
2	3.666667	2.666667

Sumber: Data Primer Diolah, 2025.

Berdasarkan Tabel 1.1 ditemukan bahwa pada *Cluster* 1 akses pada lembaga keuangan dan bank berada pada poin 3 yaitu “cukup”, sementara permodalan dan pencatatan keuangannya berada pada poin 2 yaitu “buruk”. *Cluster* 2 akses pada lembaga keuangan dan bank berada pada poin 4 yaitu “bagus”, sementara permodalan dan pencatatan keuangannya berada pada poin 3 yaitu “cukup”.

Tabel 1. 2 *Summary Hasil Clustering Berdasarkan Nilai Median*

Cluster	Akses Kelembaga Keuangan dan Bank	Permodalan dan Pencatatan Keuangan
<int>	<dbl>	<dbl>
1	3	2
2	4	3

Sumber: Data Primer Diolah, 2025.

Berdasarkan Tabel 1.2 ditemukan bahwa pada *Cluster* 1 akses pada lembaga keuangan dan bank berada pada poin 3 yaitu “cukup”, sementara permodalan dan pencatatan keuangannya berada pada poin 2 yaitu “buruk”. *Cluster* 2 akses pada lembaga keuangan dan bank berada pada poin 4 yaitu “bagus”, sementara permodalan dan pencatatan keuangannya berada pada poin 3 yaitu “cukup”. Temuan ini mengindikasikan bahwa kelemahan pada sebagian responden dapat menjadi hambatan serius bagi keberlanjutan usaha, terutama dalam memperoleh akses pembiayaan maupun menjaga kesehatan arus kas. Fenomena ini menggambarkan bahwa masih terdapat kesenjangan (*gap*) dalam kemampuan finansial pelaku UMKM di Kecamatan Kemang. Kondisi tersebut menjadi indikasi perlunya model pengelolaan dan proyeksi keuangan yang sederhana dan mudah dipahami, agar pelaku UMKM dengan literasi keuangan rendah sekalipun dapat menyusun perencanaan keuangan dan menilai kelayakan usahanya secara mandiri. Otoritas Jasa Keuangan (2023) mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama UMKM mengakses pembiayaan bank adalah rendahnya kualitas laporan keuangan.

Literasi keuangan UMKM juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan kelayakan pengajuan pembiayaan. Seperti penelitian terdahulu pada UMKM Batik Dahon mengenai terbentuknya rencana keuangan yang terstruktur. UMKM Batik Dahon memiliki landasan yang kuat untuk mengakses pembiayaan secara aman dan terukur (Roswina *et al.*, 2025). Menurut Setiawan *et al.* (2025) perencanaan keuangan memiliki efek positif yang signifikan terhadap efektivitas manajemen keuangan UMKM. Perencanaan keuangan juga menjadi tolak ukur perkembangan usaha dan bisa memprediksi tingkat kemajuan usaha. Hakikatnya, dengan perencanaan keuangan kita bisa melihat posisi bisnis dan menjadi pedoman dengan kebutuhan modal sesuai dengan harapan perkembangan usaha. Pertumbuhan usaha dalam waktu tertentu juga bisa diprediksi melalui perencanaan keuangan (Rohmansyah *et al.*, 2023).

Financial projection models penting bagi UMKM untuk membuat perencanaan pendapatan dengan indikator perencanaan kapasitas produksi dan perencanaan harga jual per unit, perencanaan biaya dengan indikator biaya operasional dan biaya

penyusutan, perencanaan sumber dana dengan indikator modal pribadi, hutang, atau biaya modal *Weighted Average Cost of Capital* (WAAC), perencanaan laba rugi, sehingga dapat memperhitungkan kelayakan bisnisnya dengan indikator NPV, *IRR*, BEP, dan PP. Sejumlah panduan pembiayaan dan temuan riset menunjukkan bahwa kemampuan menyusun proyeksi keuangan menjadi langkah awal yang esensial agar UMKM tidak hanya mampu mengatasi kendala akses pembiayaan, permodalan, dan pencatatan, tetapi juga mampu merencanakan pertumbuhan serta menjaga stabilitas usahanya. Lembaga pembiayaan dan perbankan secara eksplisit meminta proyeksi/ arus kas dalam pengajuan pinjaman sebagai dasar penilaian kelayakan dan kemampuan bayar, sehingga proyeksi menjadi prasyarat praktis untuk mengakses kredit formal. Praktik perencanaan dan proyeksi keuangan terbukti berkontribusi pada keberlanjutan bisnis UMKM (Samiun *et al.*, 2024).

Temuan awal penelitian yang diperoleh melalui observasi lapangan di 8 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Kemang pada tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 4 pelaku UMKM batik aktif dan yang akan diproyeksi hanya 2 pelaku yang mewakili batik cap dan batik tulis. Karakteristik usaha tersebut mayoritas masih berskala mikro dengan *omzet* rata-rata Rp3-10 juta per bulan dan jumlah tenaga kerja 1-2 orang. Proses produksi sebagian besar menggunakan teknik batik tulis dan cap dengan komposisi biaya bahan baku mencapai 40-50% dari total biaya produksi (Data Primer, 2025).



Sumber: Dokumentasi Pemilik Batik, 2025

Gambar 1. 4 Alat - alat Pembuatan Batik Cetak

Gambar 1.4 adalah alat-alat yang digunakan dalam pembuatan batik cap yang menjadi bagian utama dari aktivitas produksi para pelaku UMKM batik di Kecamatan Kemang. Aktivitas produksi ini memerlukan penggunaan bahan baku dan peralatan secara terus-menerus dan sebagian besar pelaku UMKM belum melakukan pencatatan biaya produksi secara sistematis, seperti tidak memasukkan biaya penyusutan di setiap peralatan yang dipakai. Akibatnya, informasi mengenai besaran biaya bahan baku, biaya *Overhead*, serta biaya tenaga kerja tidak tercatat dengan jelas dalam laporan keuangan. Ketidadaan pencatatan biaya yang akurat ini berdampak pada lemahnya penyusunan laporan laba rugi dan neraca sederhana, sehingga pelaku UMKM kesulitan dalam mengukur kinerja finansial maupun merencanakan pengembangan usaha (Ihsan & Nurlaila, 2024).

Sebagian besar pelaku UMKM batik di Kecamatan Kemang belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baku. Pencatatan hanya sebatas kas masuk dan kas keluar harian tanpa pemisahan akun-akun akuntansi. Akibatnya, mereka kesulitan memproyeksikan arus kas, menghitung *BEP*, dan menentukan kelayakan ekspansi usaha. Padahal, dalam kajian akuntansi keuangan, informasi keuangan yang andal menjadi dasar dalam penilaian kelayakan bisnis. Berdasarkan hasil observasi awal dengan pelaku UMKM batik, mayoritas usaha mengandalkan modal pribadi tanpa kredit formal. Minimnya laporan keuangan membuat UMKM sulit mengakses pembiayaan bank. Padahal, dengan model proyeksi keuangan yang terstruktur, pelaku usaha dapat memperkirakan kebutuhan modal kerja, arus kas, dan potensi laba, sehingga memperbesar peluang ekspansi. Menurut survei literasi keuangan UMKM oleh OJK (2022) hanya 27% pelaku UMKM di Indonesia yang memiliki pemahaman dasar mengenai laporan keuangan dan proyeksi arus kas. Kondisi ini serupa dengan kasus di Kecamatan Kemang, di mana 80% pelaku UMKM batik masih belum memiliki pembukuan yang sistematis. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, kegiatan ini mengambil fokus pada “*Financial Projection Models for Business Feasibility Assessment of Batik in Kemang District, Bogor Regency*”.

1.2. Analisis Masalah

Analisis masalah dilakukan dengan observasi awal di Kecamatan Kemang untuk mengetahui secara pasti permasalahan-permasalahan UMKM salah satunya tentang literasi keuangan. Sebagian besar pelaku UMKM juga belum melakukan perencanaan keuangan jangka panjang, sehingga belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menyusun proyeksi keuangan secara terstruktur. Pelaku UMKM membutuhkan model yang sederhana dan mudah dipahami. Tanpa adanya model yang praktis, UMKM kesulitan menghitung kelayakan usaha mereka. Para pelaku UMKM juga menjalankan usaha tanpa menghitung proyeksi pendapatan, biaya operasional, titik impas (*break even point*), serta periode pengembalian investasi (*payback period*). Hal ini menyebabkan usaha menjadi tidak terukur dan beresiko mengalami kerugian yang tidak terprediksi. Secara lebih jelas, analisis masalah tersebut dapat ditentukan ke dalam poin-poin berikut:

1. Pelaku UMKM Batik kesulitan menghitung biaya produksi, menetapkan harga jual yang tepat, dan memperkirakan keuntungan usaha.
2. Pelaku UMKM Batik belum mampu menghitung kelayakan usaha menggunakan indikator keuangan seperti *sales projection*, *cost projection*, *profit and loss*, *break even point (BEP)*, *Net Profit Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)* dan *payback period*.
3. Ketiadaan model proyeksi keuangan yang sesuai menyebabkan pelaku UMKM Batik di Kecamatan Kemang sulit mengukur kelayakan usaha dan rentan mengalami kerugian yang tidak terprediksi.

Berdasarkan analisis masalah di atas, dapat disimpulkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pelaku UMKM Batik menghitung biaya produksi, menetapkan harga jual yang tepat, serta memperkirakan keuntungan usaha dengan lebih akurat?
2. Bagaimana pemahaman pelaku UMKM Batik terkait kelayakan usaha menggunakan indikator keuangan seperti *sales projection*, *cost projection*, *profit and loss*, *break even point (BEP)*, *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, dan *payback period*?
3. Bagaimana perancangan model proyeksi keuangan yang sederhana, mudah dipahami, serta sesuai dengan karakteristik UMKM Batik di Kecamatan Kemang agar dapat membantu mengukur kelayakan usaha dan mengurangi risiko kerugian yang tidak terprediksi?

1.3. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

1.3.1. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan analisis masalah yang telah dijelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kecamatan Kemang melalui pengembangan model proyeksi keuangan UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membantu pelaku UMKM Batik dalam menghitung biaya produksi, menetapkan harga jual yang tepat, serta memperkirakan keuntungan usaha secara akurat sesuai dengan kondisi usaha UMKM.
2. Untuk menganalisis tingkat pemahaman pelaku UMKM Batik terhadap indikator kelayakan usaha yang meliputi *sales projection*, *cost projection*, *profit and loss*, *break even point (BEP)*, *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, dan *payback period*.”
3. Untuk merancang model proyeksi keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan dapat digunakan oleh pelaku UMKM Batik sehingga membantu pelaku UMKM menyusun proyeksi keuangan usaha secara sederhana dan sistematis.

1.3.2. Manfaat Kegiatan

Kegiatan penerapan model proyeksi keuangan UMKM ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi pelaku UMKM, investor dan masyarakat.

1. Manfaat bagi Pelaku UMKM

Adapun beberapa manfaat bagi pelaku UMKM, antara lain:

- a. Membantu pelaku UMKM menghitung biaya produksi, menentukan harga jual, serta memproyeksikan pendapatan usaha,
- b. Memberikan pemahaman tentang perhitungan kelayakan usaha menggunakan indikator keuangan seperti *break even point (BEP)* dan *payback period*.

- c. Mengurangi risiko kerugian usaha yang tidak terprediksi karena perencanaan keuangan yang lebih terukur.

2. Bagi Investor dan Masyarakat

Adapun, beberapa manfaat bagi investor dan masyarakat, antara lain:

- a. Menyediakan informasi keuangan yang lebih jelas dan terukur bagi investor dalam menilai potensi usaha UMKM.
- b. Mempermudah investor dalam mengambil keputusan investasi pada usaha UMKM di Kecamatan Kemang.
- c. Membangun kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pengelolaan keuangan UMKM yang lebih profesional.

3. Bagi Penulis

Adapun, beberapa manfaat bagi penulis, antara lain:

- a. Menambah pengalaman dan wawasan penulis dalam pengembangan model proyeksi keuangan untuk UMKM.
- b. Memperkaya referensi akademis terkait penerapan model keuangan sederhana pada UMKM.
- c. Menjadi media pembelajaran dan evaluasi bagi penulis dalam mengaplikasikan teori keuangan secara praktis di lapangan.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan ini meliputi proses penyusunan model proyeksi keuangan untuk UMKM Batik dalam rangka menilai kelayakan usaha di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor sebagai lokasi yang memiliki potensi pengembangan desa wisata dan pemberdayaan UMKM lokal. Model yang dihasilkan disusun untuk menjadi alat bantu dalam perencanaan keuangan dan penilaian kelayakan usaha UMKM, khususnya dalam aspek perhitungan HPP, proyeksi pendapatan, dan indikator kelayakan finansial seperti *BEP*, *PP*, *NPV*, dan *IRR*.

1.5. Rencana Aksi dan Solusi

Tabel 1. 3 Tabel Rencana Aksi dan Solusi Kegiatan

No.	Masalah	Rencana Aksi/Target Kegiatan & Solusi	Target Luaran	Indikator Capaian Luaran
1.	Kesulitan menghitung biaya produksi, menetapkan harga jual yang tepat, dan memperkirakan keuntungan usaha.	Melakukan analisis dan perhitungan biaya produksi dan harga jual berbasis kasus riil.	• Tersusunnya perhitungan biaya produksi dan harga jual. • Diperoleh data empiris terkait struktur biaya dan komponen HPP.	• Tersusunnya alat ukur HPP dan penetapan harga jual sederhana yang bisa digunakan oleh UMKM. • Dokumen hasil perhitungan biaya produksi dan harga jual tersusun lengkap dan sesuai format.
2.	Pemahaman menghitung kelayakan usaha menggunakan indikator <i>sales projection, cost projection, profit and loss, break even point (BEP), Net Profit Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR)</i> dan <i>payback period</i> .	• Analisis Tingkat Pemahaman Indikator Kelayakan Usaha dan <i>Clustering</i> UMKM Berbasis Data Kuantitatif. • Penerapan metode perhitungan indikator kelayakan usaha untuk menilai kelayakan finansial.	• Tersusunnya hasil perhitungan indikator kelayakan usaha (<i>PP, BEP, NPV, IRR</i> dan <i>Profitability index</i>). • Terdapat hasil kelayakan usaha yang menunjukkan tingkat profitabilitas dan <i>going concern</i>.	• Tersedianya format analisis kelayakan usaha sederhana yang mencakup BEP, NPV, dan <i>Payback Period</i>. • tersedianya hasil analisis pemahaman indikator keuangan dari 100 responden dan mengkerucut khusus kepada UMKM Batik.

No.	Masalah	Rencana Aksi/Target Kegiatan & Solusi	Target Luaran	Indikator Capaian Luaran
3.	Belum tersedianya model proyeksi keuangan yang sederhana dan sesuai kebutuhan.	Merancang model proyeksi keuangan yang sederhana, mudah dipahami serta sesuai dengan karakteristik UMKM Batik.	Tersedianya model proyeksi keuangan untuk UMKM.	• Tersedianya model proyeksi keuangan final disesuaikan dengan kondisi UMKM Batik Kemang. • Model memuat format <i>input</i> dan <i>output</i> keuangan yang jelas dan mudah dioperasikan.

Sumber: Data Primer, 2025.

1.6. Target Luaran Kegiatan dan Indikator Capaian Luaran

Tabel 1. 4 Target Luaran Kegiatan dan Indikator Capaian Luaran

No.	Jenis/Target Luaran	Indikator Capaian Luaran
1.	• Tersusunnya perhitungan biaya produksi dan harga jual. • Diperoleh data empiris terkait struktur biaya dan komponen HPP.	• Tersusunnya alat ukur HPP dan penetapan harga jual sederhana yang bisa digunakan oleh UMKM. • Dokumen hasil perhitungan biaya produksi dan harga jual tersusun lengkap dan sesuai format.
2.	• Tersusunnya hasil perhitungan indikator kelayakan usaha (<i>PP</i>, <i>BEP</i>, <i>NPV</i>, <i>IRR</i> dan <i>Profitability index</i>). • Terdapat hasil kelayakan usaha yang menunjukkan tingkat profitabilitas dan <i>going concern</i>.	• Tersedianya format analisis kelayakan usaha sederhana yang mencakup <i>BEP</i>, <i>NPV</i>, dan <i>Payback Period</i>. • tersedianya hasil analisis pemahaman indikator keuangan dari 100 responden dan mengerucut khusus kepada UMKM Batik.
3.	Tersedianya model proyeksi keuangan untuk UMKM.	• Tersedianya model proyeksi keuangan final disesuaikan dengan kondisi UMKM Batik Kemang. • Model memuat format <i>input</i> dan <i>output</i> keuangan yang jelas dan mudah dioperasikan.

Sumber: Data Primer, 2025

